

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mereka yang berkuasa memikul tanggung jawab yang besar, karena mereka tidak hanya dapat mempengaruhi sesuatu, tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungan. Selain itu, pengaruh pemegang kekuasaan dapat didasarkan pada keinginan atau kepentingan bersama. Kekuasaan itu sendiri dapat dihasilkan dari posisi atau keturunan pribadi. Dalam hal ini, status pribadi dapat diperoleh dengan mengabdikan pada organisasi atau lembaga yang presidennya dipegang oleh orang tersebut. Sebagai presiden, Anda harus memikirkan bagaimana Anda dapat memajukan organisasi atau institusi.

Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan, kapasitas atau kemampuan untuk membujuk, mempengaruhi, mengontrol, mengarahkan, dan memerintah orang lain. Seiring berjalannya waktu, persoalan kebangkitan Islam (revival of Islam), dan selanjutnya perbedaan istilah dalam bentuk, karakteristik, sifat, dan ruang lingkup kebijakan sistemik dan negara Islam, semakin mendapat perhatian. Namun, analisis politik Islam lebih banyak berbicara tentang peristiwa politik yang terjadi di dunia Muslim kontemporer, tanpa upaya untuk menyelidiki aspek teori politik, memiliki pengaruh besar pada fenomena ini.

Suatu kegagalan sumber ilmiah yang bersangkutan pada Islam Ilmu politik dan Islam, disebabkan dari berbagai kedisiplinan yang sangat tidak memadai, Ilmu politik modern telah dimaknai dengan sangat efektif sehingga terjadinya kehilangan hubungan dengan aspek-aspek lainnya dari usaha-usaha kelompok kehidupan masyarakat. Penyebab ketidakadanya memikirkan suatu permasalahan etnis yang hakiki dikarenakan tidak memadainya sarana-prasarana ilmu politik.

Penyajian dan kejelasan gagasan penulis tentang teori politik Islam juga meresahkan. karena pada dasarnya sebuah karya tulis lebih banyak membahas

tentang teori politik daripada teori politik atau filsafat politik. Dalam perdebatan antara agama dan politik. Tokoh politik Islam lebih fokus pada tulisan-tulisan hukum klasik dan abad pertengahan atau menjelaskan struktur lembaga pemerintahan Islam awal yang secara historis dianggap suci. Akibatnya, tren ini diterjemahkan menjadi kurangnya atau tidak adanya pemikiran politik Islam saat ini.¹

Tidak berniat seakan memaksa sebuah pengertian yang membebani kepundak para umat manusia yang sudah menjadi syarat tanggungjawab, walaupun berarti bagi kita atau tidak berkaitan sama sekali, dan kita sebagai umat manusia pasti akan sangat ingin mengerti tentang bagaimana cara untuk memahami tentang kekuasaan secara benar. Kekuasaan bukanlah persoalan tentang wilayah ataupun harta melainkan kekuasaan tentang persoalan bentuk dan bagaimana situasi yang esensial dalam hubungan kemanusiaan.

Secara garis besar di Indonesia, kekuasaan yang berasal dari hukum adat adalah bagaimana penerapan pandangan hidup atau implementasi dari pandangan yang dianut. Masyarakat yang tinggal di Indonesia dengan pandangan hidup secara utuh menyeluruh dalam membuat suatu keadilan dan ketertiban di dalam kelompok masyarakat atas hukum yang mencerminkan suatu keadaan status masyarakat itu sendiri.

Supaya lebih memahami dan mendalami hakekat “suatu dilema pengetahuan” persoalan itu dikaji secara komprehensif dengan melakukan perenungan, pengujian dan pengajaran kritis serta evaluasi yang secara tertib dan sistematis. Persoalan tentang kekuasaan ialah salah satu masalah pada filsafat kenegaraan yang lebih mentingkan suatu tinjauan.

Memahami hakikat dasar Kekuasaan dan Politik Islam tindakan dan praktik politik Islam di satu sisi serta perolehan dan penggunaan suatu kekuasaan di sisi lain yang akan selalu lebih bijaksana. Namun Ahli teori politik menarik untuk di diskusikan persoalan tentang sifat tatanan politik yang baik untuk dikerjakan dikarena kekuasaan adalah sarana untuk mencapai tujuan politik. Dengan

¹Ahmad Muntaz, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Bandung, Mizan, 1986) h. 13-15

demikian pertanyaan tentang misi tatanan politik yang harus di satukan dari pertanyaan tentang tujuan itu sendiri.

Norma negara menetapkan hak-hak anggota masyarakat dalam kehidupan sosial, terutama perilaku mereka dalam kehidupan sosial dan kewajiban mereka untuk mematuhi. Jika adaptasi terhadap kondisi ini hanya melayani kehendak manusia, akan sulit untuk mencapai tujuan dari kondisi ini. Bertindak untuk mempengaruhi kehendak bebas berarti mengharuskan semua orang untuk mematuhi hukum negara. Ketaatan wajib terhadap bangsa ini menimbulkan pertanyaan tentang kekuasaan dalam hal kemampuannya untuk melakukan paksaan.

Kekuasaan adalah pemindahan kekuasaan atau kekuasaan kepada individu atau lembaga. Artinya kekuasaan berasal dari negara, terutama peraturan pemerintah yang mengatur kekuasaan tersebut. Kekuatan ini harus selalu digunakan oleh manusia, dan tentunya ia memiliki banyak kekurangan dalam menggunakannya. Wewenang atau kekuasaan atas diri sendiri atau orang lain termasuk untuk melaksanakan apa yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Apakah hukum dinyatakan dan diterapkan oleh negara? Memang, hukum harus benar-benar diperhatikan, dihormati dan dihargai oleh banyak filosof politik.

Maka dari itu pentingnya mempelajari tentang pemikiran politik Islam. Nurcholis Madjid berkata: "Dalam masalah politik ini, umat Islam dapat mengatakan bahwa agama berbeda dari banyak agama lain". Penjelasan bahwa sering timbulnya stereotip menyiratkan bahwasannya berarti sama dengan menyangkal realitas situasi yang telah berlangsung lebih dari empat abad dan untuk berapa abad akan berlanjut. Dan tentu saja itu juga sebagian akan meniadakan esensi agama Islam.

Kebijakan Islam selalu didominasi oleh Al-Qur'an dan hadits sebagai landasan utama, dan oleh Nabi Madinah dan Al Krafaul al-Rasyidun sebagai implementasi kebijakan Islam. Al-Qur'an adalah pedoman dan pedoman bagi semua, bukan hanya umat Islam itu sendiri, dan sebagai fitur yang membedakan yang baik dari yang jahat, seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

Artinya: “Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).”²

Tentang masalah politik, Al-Qur'an juga memberikan pedoman yang harus diikuti oleh umat Islam dan umat manusia pada umumnya. Tentu saja, frase politik selalu bersifat umum dan perlu ditafsirkan agar prinsip-prinsip politik dapat diterapkan oleh masyarakat.

Dalam perkembangan politik Indonesia dan politik NU juga berkembang pesat. NU mulai terekspos dengan politik nasional, terutama pada masa pascakemerdekaan. Presentasi ini merupakan pengaruh gerakan nasionalis di beberapa negara yang bergerak menuju kemerdekaan. kontribusi paling nyata bagi kebijakan negara PBB adalah dukungan Wahid Hasyim, perwakilan PBB di PPKI, untuk tidak memasukkan Piagam Jakarta dalam beberapa isinya dalam konstitusi negara kita.³

Esensi NU dibentuk tidak hanya untuk tujuan kekuasaan politik tetapi untuk politik (agama) yang selalu berlandas pada rakyat. Jadi, bagi umat Islam Indonesia yang ingin mendekatkan praktik dan pemikiran keagamaannya dengan tradisi lokal, kehadiran NU dipandang sebagai sebuah perlindungan. Jika ini bisa disebut aksi politik kerakyatan dalam arti luas, maka politik semacam ini layak disebut politik level tertinggi NU. Sedangkan untuk politik kekuasaan, keterlibatan pertama NU ditandai dengan dukungannya terhadap pembentukan Masyumi. Ketika mereka menjadi pro-Masyumi, tokoh-tokoh terkemuka di PBB terlibat dalam perebutan kekuasaan, baik untuk posisi partai maupun non-partai (eksekutif). Politik kekuasaan saat itu berakhir dengan perpecahan, sebuah konflik politik yang agak tidak menyenangkan. Keterlibatan terkuat dalam politik

²Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan QS* (2 : 185)

³Khamami Zada & A. Fawaid Sjadzili, *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 3-5.

kekuasaan terjadi ketika NU didirikan sebagai partai politik (1952) setelah bubar atau cerainya Masyumi.

Sebagai organisasi besar yang sudah cukup lama berkiprah di perpolitikan Indonesia, tentu tidak ada salahnya NU memiliki wadah bagi aspirasi politik warganya. Hal ini untuk menghindari perpecahan di lingkungan NU sendiri, meskipun ada keterbukaan di lingkungan NU dalam menyampaikan aspirasi politik warganya. Sejauh ini semuanya berjalan baik.⁴ Kebijakan NU adalah kebijakan nasional, bukan kebijakan keuntungan sementara. Ini bukan kebijakan semalam, tapi kebijakan segala sesuatu. Agar tidak mengikis cita-cita luhur para pendiri NU dan mampu ikut serta membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan semangat kebangsaan dan kepedulian sosial yang besar.

kekuasaan bukanlah jalan pintas yang harus ditempuh. Dia hanyalah kendaraan. Namun pendekatan kultural dan sikap populis organisasi NU bisa menjadi alternatif sekaligus mengembangkan wibawa tersendiri bagi NU, meski belakangan ini NU agak terjebak dalam dilema, situasi yang sangat janggal dan penting. Di satu sisi, NU tidak ingin berpartisipasi secara praktis dalam politik, tetapi di sisi lain, “semangat politik” para pemimpin NU sulit untuk dibendung. Nampaknya, karena jiwa politik di NU sudah mendarah daging, sepertinya NU tidak bisa meninggalkan kancah politik yang membawa manis-manis buatan itu, meski sesaat. Hal inilah yang ditegaskan Asep Saeful Muhtadi bahwa NU mau tidak mau harus berpolitik untuk menyulut gairah atau energi politik orang, elit, dan organisasi tertentu.

Jauh sebelum NU berdiri, titik-titik embrio kekuatan politik Islam tradisional di NU diciptakan oleh KH. Wahab Hasbullah. Sebagian besar kegiatan gerakan tersebut dilakukan oleh KH Wahab Hasbullah sebagai bagian dari pengambilalihan politik. Hasilnya adalah berkembangnya organisasi-organisasi yang dikenal sebagai Nahdlatul Tujjar, Nahdlatul Wathan, Subbanul Wathan, dan Tashwirul Afkar. Ketiga lembaga ini kemudian melahirkan banyak gerakan etis dengan ciri khasnya masing-masing. Kemudian, pada tahun 1945, NU mengeluarkan resolusi Jihad yang membangkitkan semangat juang para pembela

⁴Mohammad Sobary, *NU dan Keindonesiaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.15-6.

Republik, khususnya di Jawa Timur. Melalui perwakilannya di PPKI, KH. A. Wahid Hasyim, NU menolak keras “Piagam Jakarta” atas nama persatuan bangsa.

Keterikatan dan kedekatan NU dengan politik mirip seperti antara orang tua dan anak. Tidak bisa kita pungkiri bahwa para pendiri NU adalah tokoh politik yang sangat cerdas dan brilian. Meskipun mereka tidak secara terbuka menyuarakan suara politik mereka, sikap dan pendapat mereka mengarah pada pemeliharaan pemerintahan yang adil. Karena, seperti disebutkan sebelumnya, tanpa pemerintahan yang sah, itu tidak akan berhasil. Dan selama menjadi organisasi keagamaan, sosial dan politik, NU tidak pernah terlibat dalam kasus pemberontakan umat Islam. Komitmen berbangsa dan bernegara didahulukan karena NU mengakui bahwa keberadaan negara sangat penting bagi kehidupan beragama dan manusia dalam sabda *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*.⁵

NU memiliki beberapa model politik. Dan dua model politik NU, yakni politik kerakyatan dan politik kenegaraan, merupakan eksperimen paling idealis dalam sejarah NU. Mengapa? Kedua model ini menjadikan NU sebagai organisasi keagamaan yang diarahkan pada kebaikan dan kemaslahatan umum (*mashlahatul 'ammah*). Namun demikian, PBB relatif proaktif dalam melanggengkan kedua model politik tersebut karena adanya godaan politik kekuasaan, baik di dalam maupun di luar PBB. Dan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, keterlibatan pertama NU dalam politik kekuasaan adalah ketika ia mendukung organisasi pendiri.

Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, juga memiliki tugas untuk berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita peradaban bangsa. Karena NU lahir bukan hanya untuk pergaulannya tetapi juga untuk mengetahui bagaimana NU bisa berkontribusi untuk negara. Dan NU telah berusaha untuk terlibat dalam memberikan jalan peradaban yang dapat diberikan kepada bangsa dan negara ini sejak awal kisah kelahirannya dan dinamika keberadaannya.

⁵*Abu Dzarrin Al-Hamidy, dkk, Sarung & Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan*, (Surabaya: Khalista, 2008), h. 69-70. Perhatikan puladalam AULA, (Surabaya: Agustus, 2007)

Pertama, NU berpijak pada konsep mabadi 'kheiro ummat (prinsip dasar ummat terbaik) berdasarkan orientasi etis perubahan sosial ekonomi masyarakat. Penegasan moral berdasarkan asshidq (kejujuran) dan al amanah (tanggung jawab). Kedua, di bidang agama, NU berhasil merumuskan gagasan dasar tawassuth (moderat), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i'tidal (keadilan). Ketiga, NU telah memelopori penerimaan dan pengamalan Pancasila sebagai prinsip bernegara dan bermasyarakat yang dapat diterima oleh warga negara Indonesia yang majemuk. Atas dasar itu semua, NU memiliki kewajiban untuk menegakkan dan mempertahankan prinsip-prinsip dasar Negara yang telah dirumuskan oleh para pendahulunya, melalui darah para syuhada dan tinta para ulama, sebagai pewaris para Nabi dari Allah.

Proses dinamis dalam lembaga NU di negeri ini seperti perahu dayung antara dua pulau, yaitu gerakan sosial-keagamaan dan ummat. sekaligus kekuasaan politik (political power) yang didasarkan pada massa atau rakyat terus mengikutsertakan dalam gerakan-gerakan budaya, menimbulkan, dan mewujudkan semangat sosial rakyatnya. Tidak berlebihan jika seorang tokoh terkemuka, Dawam Rahardjo, mencontohkan bahwa dalam perkembangan politiknya, NU tidak menunjukkan konservatisme, terutama dalam perilaku sosial politiknya.

Masa depan NU ditentukan oleh kemampuannya menggunakan analisis dengan baik di tengah gelombang kebijakan nasional dan tuntutan sosial sebagai konsekuensi logis dari gerakan politik modern. Dan di sisi lain, NU masih dipandang sebagai representasi Islam tradisional (timur) Indonesia, yang memiliki akar yang dalam dan memiliki model sosial yang cukup kuat. Wajar saja, Dawam Rahardjo juga sependapat dengan argumen Asep Saeful Muhtadi bahwa NU memiliki media politik yang patut mendapat perhatian. NU, tulisnya, bukanlah partai politik tetapi harus melakukan komunikasi politik untuk kepentingan masyarakat yang didiaminya. Sebab, jika ditelisik lebih jauh, meski bukan partai politik, NU adalah organisasi politik atau ormas yang tentunya harus ikut berpolitik. Sedemikian rupa sehingga dari dalam PBB bermunculan partai-partai politik, baik pada awal keberadaannya maupun baru-baru ini. Padahal, PBB di

masa lalu telah berwajah dan bernafas sebagai satu partai politik, dan menjadi pesaing partai politik. PKI dan Masyumi.

Perspektif kekuasaan dalam NU juga banyak telah di bahas dalam berbagai media dan jurnal dengan mengkaitkannya persoalan kekuasaan di dalam berpolitik. Berpolitik itu sendiri harus mempunyai rasa simpati terhadap manusia yang akan di aplikasikan terhadap rakyatnya agar masyarakat di suatu daerah mempunyai ketentraman dalam kehidupannya. Telah dijelaskan dalam alquran mempunyai kekuasaan harus di pakai dengan sebaik-baik mungkin untuk menunjang keberlangsungan hidup rakyatnya. Al-Qur'an mengajarkan kepada umat Islam bahwa konsep kepemimpinan adalah kekuasaan di tangan Allah SWT sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al Imran ayat 26 yang berbunyi

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ
مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

artinya *Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.*⁶

Allah SWT memberikan seseorang kekuasaan bukan untuk memenuhi hasrat seorang pemimpin itu sendiri. Melainkan harus mengutamakan rakyatnya dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dll. Tetapi pada kenyataannya terutama di negara indonesia banyak sekali yang menyalahgunakan kekuasaan untuk individu. Contohnya seperti dalam kasus anggaran dana dari pemerintah yang seharusnya di alokasikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya namun pada realitanya mengalami pemotongan jumlah bantuan ataupun bahkan sama sekali tidak tersalurkan kepada masyarakat

⁶ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan QS (3: 26)*

dikarenakan oleh ulah beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab akan amanah yang di pegangnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uatarakan diatas, maka dengan ini penulis tertarik dan akan meneliti skripsi dengan judul **“KEKUASAAN POLITIK PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA**

B. Batasan Istilah

Untuk mengetahui akar dari permasalahan yang terdapat didalam judul penelitin ini, maka perlu untuk membuat batasan istilah terhadap judul penelitian ini di antaranya :

1. Kekuasaan : Menurut Miriam Budiardjo dalam buku Pengantar Ilmu Politik (2015), kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok orang untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain dengan cara yang diinginkan.
2. Politik : Politik adalah usaha warga negara untuk mewujudkan kepentingan bersama (teori klasik Aristoteles). Politik adalah urusan negara dan administrasi publik negara. Politik adalah tentang perumusan dan implementasi kebijakan publik pemerintah.
3. Perspektif : Menurut Sumaatmadja dan Winardit, perspektif adalah cara pandang dan perilaku seseorang terhadap suatu masalah atau kegiatan. Dalam hal ini mengandung arti bahwa manusia selalu memiliki cara pandang yang berguna untuk memahami sesuatu.
4. Nahdlatul Ulama : Nahdlatul Ulama atau disingkat NU, adalah organisasi Islam terbesar di dunia yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M atau kalender Islam Rajab 13 1344 H di kota Surabaya dan bergerak dalam bidang agama, pendidikan, social dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan pemahaman tradisi keagamaan dan Ahlusunah wal Jama'ah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akat diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Nahdlatul ulama terhadap kekuasaan politik islam?
2. Bagaimana praktek atas kekuasaan politik yang benar menurut Nahdlatul Ulama?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dalam Memahami kekuasaan politik dan bagaimana praktik kekuasaan politik Nahdlatul Ulama

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini jika di lihat dari segi teoritis dan segi praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman, pengetahuan, dan gambaran yang jelas tentang peran Nahdlatul Ulama dalam memahami Kekusaan Politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, sebagai masukan untuk merumuskan kebijakan terutama mengenai peran Nahdlatul Ulama dalam memahami Kekusaan Politik.
- b. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal peran Nahdlatul Ulama dalam memahami tentang Kekusaan Politik.

F. Kajian Terdahulu

Ada beberapa kajian terdahulu dalam penulisan skripsi saya yang berjudul Kekuasaan Perspektif Politik Islam (Kiat Telaah Asas Pemikiran Politik Nahdlatul Ulama) Diantaranya :

1. Skripsi oleh Ahmad Ilyas Hidayat (30100106008) mahasiswa program Pemikiran Politik Islam UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ALAUDDIN MAKASSAR dengan judul Kekuasaan Perspektif politik Islam. Beliau menjelaskna bahwa Politik atau siyasah dari sudut pandang Islam tidak terbatas pada politik dalam pemerintahan dalam negeri dan luar negeri, tetapi termasuk

dalam politik bahkan di lembaga terkecil seperti rumah tangga. Politik atau siyasah adalah cara menyatukan urusan hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan seterusnya. Politik adalah ruang yang sangat besar, sebesar ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam dunia keluarga dan publik, budaya dan struktur, individu dan komunitas.

2. Skripsi oleh Tobot Lubis (4415 1 001) mahasiswa program Pemikiran Politik Islam UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA dengan judul Kekuasaan Politik Dalam Al Qur'an Menurut Pemikiran Hamka. Beliau menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah/penguasa. Kekuatan politik yang dimiliki seseorang di muka bumi ini bukanlah mutlak yang dimilikinya, melainkan hanya titipan dari Allah Swt. karena Tuhan adalah sumber dan pemilik kekuatan ini. Janji Tuhan kepada mereka yang percaya dan melakukan perbuatan baik Shalih adalah bahwa Tuhan akan memberi mereka kekuatan yang sama dengan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang sebelum mereka.
3. Jurnal Masmuni Mahatma dengan judul Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam bernegara. Beliau menyimpulkan bahwa NU memiliki beberapa model kebijakan. Dan dua model politik NU, yaitu model kerakyatan dan politik kenegaraan, merupakan yang paling idealis dalam sejarah NU. Kedua model ini menjadikan NU sebagai organisasi keagamaan yang diarahkan pada kebaikan dan kemaslahatan umum (mashlahatul 'ammah). Meski begitu, NU relatif aktif dalam melanggengkan dua model politik ini karena godaan politik kekuasaan, baik dari NU sendiri maupun dari luar NU.
4. Jurnal Nor Hasan dengan judul Agama dan Kekuasaan Politik Negara. Ia menjelaskan bahwasannya Negara harus melayani orang, dengan mekanisme yang memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, bukan sebaliknya. Penguasa harus "memerintah di " bukan "memerintah" (pemerintah memberi arahan, bukan hanya pelaksanaan kekuasaan). Pemerintahan tak terbatas cenderung menciptakan faksi yang berkuasa, memprioritaskan tujuan pribadi di atas kepentingan umum. Agar dapat mengatasi hal ini, kekuasaan

politik harus dibatasi pada pembagian kekuasaan (kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak dapat didelegasikan kepada satu badan).

5. Jurnal Firdaus Muhammad dengan judul DINAMIKA PEMIKIRAN DAN GERAKAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA Artikel ini mengambil perspektif tentang dinamika politik Nahdlatul Ulama sosiologis, historis dan antropologis. Berdasarkan fakta yang ada Dinamika politik NU terlihat berpihak, dengan aspek agama, politik dan budaya. NU terlibat Politik. Organisasi ini juga mendeklarasikan dirinya di luar dunia Politik kemampuan NU untuk beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan zaman memunculkan organisasi di tengah sungai ini berubah dalam komunitas politik dan menjadi organisasi keagamaan terbesar se-Indonesia.
6. Jurnal Manawir Haris dengan judul PARTISIPASI POLITIK NU DAN KADER MUSLIMAT DALAM LINTAS SEJARAH. Jurnal ini menjelaskan tentang Gerakan politik NU sebagai sebuah organisasi keagamaan dan Muslimat NU tampil sebagai badan otonom dalam sejarah bangsa. Masalah yang muncul adalah seberapa besar NU berpartisipasi dalam politik nasional Representasi besar umat Islam NU dalam politik. Dengan pendekatan Tipologi, artikel ini mengkaji kontribusi politik NU dan umat Islam NU sepanjang sejarah bangsa. Informasi lain-lain menunjukkan bahwa NU dan umat Islam NU berpartisipasi secara pasif dan aktif dalam politik negara. NU ditambahkan pada masa penjajahan tipologi peserta pasif, tetapi di musim berikutnya terus berlanjut bentuk participate aktif yang tidak biasa. Peserta aktif Hal ini terlihat ketika NU mengeluarkan resolusi jihad untuk menjaga kemerdekaan. Partisipasi ini kemudian disalurkan partai politik yang didirikan oleh Masyum dan kemudian berdiri sendiri. Partisipasi pasif Muslimat NU diakui pada tahun 1938 dan tidak diakui sebagai peserta aktif sampai tahun 1946. Muslim Berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender 1954. Lima tahun kemudian, Muslimati menjadi Galliator peserta dan mulai mewakili peran gender mereka dengan cara yang berarti sekaligus mengajukan pertanyaan-pertanyaan strategis yang sedang dicari Pemberdayaan hak, sumber daya dan aspirasi perempuan terlibat dalam kegiatan publik, termasuk politik praktis.

7. Jurnal Nurlira Goncing dengan judul Politik Nahdlatul Ulama dan Orde baru. Artikel ini membahas tentang NU sebagai organisasi keagamaan yang berdasarkan Pancasila dan tidak ada Islam formal seperti yang ditentukan dalam AD/ART untuk dikembangkan Di Indonesia, pendekatan Aswaja Islam (ahlu sunnah wal jama'ah). Kegiatan NU tidak hanya terbatas pada urusan agama sebagaimana diatur dalam berbagai ukuran dalam Khittah 1926 untuk kemajuan bangsa sesuai aswaja ajaran Islam. Ketika era Orde Baru datang, aktivitas NU terbagi menjadi dua bagian, yaitu politik menggerakkan partai NU sementara NU tetap sebagai organisasi sosial melakukan kegiatan sosial seperti berdakwah dan mengajar pengembangan masyarakat. Namun pilihan menjadi dilema yang dihadapi para Ormas NU terkait dengan partai NU dan juga tarik ulur terjadi pada PPP yang dulu merupakan partai perpecahan NU.
8. Jurnal Nurul Shobacha yang berjudul STRATEGI POLITIK NAHDLATUL ULAMA DI ERA ORDE BARU. Artikel ini berisi uraian tentang strategi politik Nahdlatul Ulama (NU). Di Era Orde Baru. NU memiliki sejarah panjang sejarah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan hubungan tersebut NU dan negara mengalami pasang surut. sekarang telah dating organisasi Islam utama di Indonesia selama dan setelah era Orde Lamaitu menjadi organisasi politik saat ini. Di Era Orde Barukarena penyederhanaan jumlah partai politik Indonesia, NU bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, NU melemah karena banyak mendominasi PPP kelompok Islam modern. Jadi mereka kembali ke Khittah pada tahun 1926 dan kembali ke awal kontrak orde lama. sekarang memutuskan untuk fokus pada pendidikan lagi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dan tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, empat kata kunci harus diperhatikan, yaitu metode ilmiah, data, tujuan dan penggunaan tertentu. Metode ilmiah adalah kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri ilmiah yaitu akal, percobaan, dan sistem. Rasional artinya penelitian dilakukan dengan cara yang wajar sehingga sesuai dengan akal manusia, pada umumnya penelitian rasional adalah penelitian yang menggunakan teori. Pengalaman berarti metode yang digunakan

dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui metode yang digunakan. Sistematis adalah proses yang digunakan untuk penelitian dengan menggunakan langkah-langkah logis tertentu.

Penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan (*libarary research*), menelaah dokumen kepustakaan atau dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan cara memilih, membaca, meneliti dan meneliti buku atau sumber tulisan lain yang terkait dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber bibliografi, yang dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penulisan laporan ilmiah.⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah yang bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep kekuasaan dan politik Islam masa lalu . Islam Nahdlatul Ulama bertujuan untuk melihat sejauh mana konsep Islam tentang kekuasaan politik.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sangat melekat pada setiap individu yang berpartisipasi dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pokok bahasan penelitian ini berupa informasi dari teknik pengumpulan data atau sering dikaitkan dengan individu untuk membantu menjawab pertanyaan yang sedang dipelajari. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok atau organisasi islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama

3. Informan Penelitian

Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah data-data yang sudah terinput kedalam beberapa jurnal dan yang tertulis dibuku yang mengenai tentang Kekuasaan Politik dalam perspektif Islam Nahdlatul Ulama

4. Teknik pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan

⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta Rineka Cipta, 2011), h. 95

pembahasan skripsi ini. Data perpustakaan yang dihasilkan kemudian dikumpulkan dan dianalisis, dan kemudian menarik kesimpulan secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu melakukan survey dokumen perpustakaan untuk mengumpulkan dokumen, dan document research yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.⁸ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data.⁹ Ada beberapa cara atau teknik untuk mengumpulkan data, antara lain observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode dokumenter sebagai alat untuk mengumpulkan data karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Dengan kata lain, teknik digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber sekunder.

3. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya dan dikumpulkan hanya oleh peneliti dari sumber lain sebagai informasi pelengkap. Beberapa sumber data sekunder adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, dan situs web atau sumber lain.

H. Analisis Data

Analisis data tidak hanya dilakukan setelah pengumpulan data, tetapi sejak langkah pengumpulan data, analisis telah dilakukan. Penulis menggunakan strategi analisis "kualitatif", yang berarti analisis menyimpang dari data dan mengarah pada kesimpulan umum.¹⁰ Berdasarkan strategi analisis data ini, untuk menarik kesimpulan umum, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka "induktif". Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis dokumen atau analisis isi (*content analysis*), analisis isi mengacu pada salah satu dari metode yang digunakan untuk menyajikan menarik kesimpulan dengan mencari karakteristik dari pesan dan dilakukan dengan tujuan dan secara

⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor :Ghalia Indonesia,2014), h. 81

⁹Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 224.

¹⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 202.

sistematis. Menurut Smith dalam buku Nanang Murtono, ia berpendapat bahwa: "Analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk secara sistematis dan obyektif memperoleh informasi penting dari bahan dengan mengidentifikasi sifat-sifat tertentu dari bahan."¹¹ Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan dan Identifikasi Subyek Penelitian.
- b. Mengumpulkan data berbasis topik pada topik melalui buku dan sumber lain.
- c. Analisis dan klarifikasi.

I. Sistematika Penulisan

Segala sesuatu tentang penelitian yang saya lakukan akan disusun menjadi lima bab, di mana saya akan menjelaskan masing-masing secara komprehensif namun sederhana sehingga saya sebagai peneliti sekaligus penulis membuat sistematika penulisan agar Pembaca dapat lebih mudah memahaminya.

Beberapa bagian bab pada penulisan skripsi ini meliputi:

Bagian Pertama

Pada BAB I disini penulis memaparkan beberapa sub bab yang berupa Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metode Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode penelitian, dan Analisis data

Bagian kedua

BAB II penulis memaparkan penjelasan atau pengertian tentang organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama, Pengertian Nahdlatul Ulama, Biografi pendiri Nahdlatul ulama, dan Madzhab Ahlussunnah Waljama'ah

Bagian Ketiga

Penulis memaparkan landasan etika politik secara umum, Paradigma kekuasaan politik dalam NU, Doktrin dan tujuan politik NU, Tujuan kekuasaan politik NU, dan Dinamika kekuasaan NU.

¹¹Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 86.

Bagian Keempat

BAB ini penulis menjelaskan tentang praktek dasar kekuasaan politik NU, Dasar-dasar politik NU, Praktik dasar politik NU dari generasi ke generasi, Gerakan politik NU, Perilaku politik NU.

Bagian Kelima

BAB bagian akhir ini saya rangkum secara singkat dari bab sebelumnya sehingga menjadi suatu kesimpulan yang memuat pokok-pokok pembahasan, dan pada bagian ini saya memberikan saran-saran yang dapat memberikan penilaian, nilai dan motivasi yang lebih baik bagi penulis dan pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN